

## P.1. KELEMBAGAAN PERUMAHAN DI PROVINSI

Instansi yang menangani perumahan dan permukiman di Provinsi, dilengkapi dengan bagan struktur organisasi.

| No. | Keterangan             |         |
|-----|------------------------|---------|
| 1.  | Nama Instansi/Dinas    | : ..... |
| 2.  | Nama Sub/Bagian/Divisi | : ..... |
| 3.  | Alamat Kantor          | : ..... |
| 4.  | Alamat E-mail          | : ..... |
| 5.  | Alamat website/situs   | : ..... |
| 6.  | No. Telepon            | : ..... |
| 7.  | No. Fax                | : ..... |

## P.2. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

### 1. Alokasi APBD Provinsi Tahun Anggaran 2005 - 2010

| Uraian                                     | Tahun Anggaran |      |      |      |      |      |
|--|----------------|------|------|------|------|------|
|  | 2005           | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total APBD                                 |                |      |      |      |      |      |
| Alokasi Pembangunan Perkim <sup>*)</sup>   |                |      |      |      |      |      |
| % Alokasi Pemb. Perkim terhadap Total APBD |                |      |      |      |      |      |

\*) Alokasi yang terkait dengan pembangunan rumah (tidak bersusun maupun bersusun) dan perumahan dengan PSU

ü Prasarana: jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan

ü Sarana:

§ Sarana Perdagangan: pasar, pertokoan, swalayan, dll

§ Sarana Pendidikan: TK, SD, SLTP, SLTA

§ Sarana Peribadatan: Mushala, Masjid, Gereja, Vihara, Pura, dll

§ Sarana Kesehatan: Puskesmas, Posyandu, Apotik, Dokter, Rumah Sakit, dll

§ Sarana Umum Pemerintahan: Pos Jaga, Ruang Serba Guna, Pemadam Kebakaran, Parkir, RTH, Rekreasi, Olah Raga

ü Utilitas: listrik, telekomunikasi, gas

### 2. Jenis Kegiatan dan Alokasi APBD Provinsi per Jenis Kegiatan Pembangunan Perkim

| No.    | Jenis Kegiatan | T.A. 2005 |           | T.A. 2006 |           | T.A. 2007 |           | T.A. 2008 |           | T.A. 2009 |           | T.A. 2010 |           |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                | Volume    | Biaya Rp. | Volume    | Biaya Rp. | Volume    | Biaya Rp. | Volume    | Biaya Rp. | Volume    | Biaya Rp. | Volume    | Biaya Rp. |
| (1)    | (2)            | (3a)      | (3b)      | (4a)      | (4b)      | (5a)      | (5b)      | (6a)      | (6b)      | (7a)      | (7b)      | (8a)      | (8b)      |
| 1.     | .....          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2.     | .....          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| dst.   | .....          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Jumlah |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

### P.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

1. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang)/ RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)?  
 a. Ada  d. Tidak ada  
 b. Dalam penyusunan  e. Lainnya (tuliskan) : ...  
 c. Tidak tahu
2. Jika mempunyai RUTR/RTRW, apakah pelaksanaannya didukung oleh adanya Properda (Program Peraturan Daerah)/ Poldas (Pola Dasar)?  
 a. Benar  c. Tidak tahu  
 b. Properda dan Poldas sedang dalam penyusunan  d. Tidak ada  
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
3. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman? (Jika ada, maka RPJMD 2010-2014 dilampirkan dalam bentuk *hardcopy/softcopy* khusus bagian yang terkait perumahan saja)  
 a. Ada  d. Tidak ada  
 b. Dalam penyusunan  e. Lainnya (tuliskan) : ...  
 c. Tidak tahu
4. Jika mempunyai RPJMD 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman, apakah sudah didukung dengan adanya RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah)?  
 a. Sudah  d. Tidak ada  
 b. Sedang dalam penyusunan  e. Lainnya (tuliskan) : ...  
 c. Tidak tahu
5. Jika sudah didukung dengan RP4D, apakah RP4D tersebut telah mengakomodasi berbagai kepentingan baik pemerintah, swasta, dan masyarakat (*stakeholders*) pada sektor permukiman?  
 a. Sudah  c. Tidak tahu  
 b. Belum  d. Lainnya (tuliskan) : ...
6. Pada penyediaan perumahan dan permukiman di Provinsi, apakah ada permasalahan yang timbul?  
 a. Ada  c. Tidak tahu  
 b. Tidak ada  d. Lainnya (tuliskan) : ...
7. Jika ada, apa permasalahan tersebut?  
 a. Sulitnya penyediaan lahan bagi kawasan perumahan  
 b. Kurangnya kordinasi antara kelembagaan yang terkait  
 c. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan bagi para *stakeholders*  
 d. Semua jawaban benar  
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
8. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman apakah Provinsi sudah pernah mendapatkan pendalaman/ sosialisasi dari Deputi Bidang Pengembangan Kawasan?  
 a. Sudah  c. Tidak tahu  
 b. Belum  d. Lainnya (tuliskan) : ...

9. Pada saat ini apakah kondisi eksisting perumahan dan permukiman di Provinsi sudah sesuai dengan zona perumahan/permukiman yang telah ada pada RTRW Provinsi?
- a. Sudah  c. Tidak tahu  
 b. Belum  d. Lainnya (tuliskan) : ...
10. Jika belum sesuai dengan RTRW Provinsi, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai zona perumahan dan permukiman yang tertuang pada RTRW  
 b. Adanya perubahan fungsi kawasan perumahan dan permukiman  
 c. Kebutuhan akan perumahan semakin tidak terkendali, dikarenakan adanya urbanisasi yang semakin meningkat  
 d. Semua jawaban benar  
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
11. Bagaimana perkiraan pada tahun-tahun mendatang mengenai penyediaan perumahan dan permukiman di Provinsi?
- a. Akan mencukupi kebutuhan masyarakat mengenai perumahan  
 b. Tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat akan perumahan, karena terjadi *backlog*  
 c. Semua jawaban benar  
 d. Lainnya (tuliskan) : ...
12. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Provinsi memanfaatkan sumber dana dari:
- a. APBD  c. Swadaya  
 b. *Loan* (pinjaman) dari badan/bank luar negeri  d. Swasta  
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
13. Untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman di Provinsi, apakah telah dilakukan survai kependudukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengetahui kebutuhan akan perumahan?
- a. Sudah  d. Tidak tahu  
 b. Sedang dilakukan survai  e. Lainnya (tuliskan) : ...  
 c. Belum
14. Apakah Provinsi memiliki lokasi KASIBA (Kawasan Siap Bangun)/ LISIBA (Lingkungan Siap Bangun)/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana?
- a. Ada  c. Tidak tahu  
 b. Tidak ada  d. Lainnya (tuliskan) : ...
15. Jika memiliki lokasi KASIBA, Kawasan Khusus, lokasi kawasan kumuh dan kawasan bencana, berapa jumlah lokasi kawasan tersebut?
- Jumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi  
 Jumlah lokasi yang belum ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
16. Jika tidak mempunyai KASIBA/ LISIBA/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana bagi perumahan dan permukiman, upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Provinsi?
- a. Melakukan perubahan fungsi lahan  d. Semua jawaban benar  
 b. Melakukan pembelian lahan  e. Lainnya (tuliskan) : ...  
 c. Melakukan *ruislag* (tukar guling) lahan

17. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Baik  d. Tidak tahu  
 b. Cukup  e. Lainnya (tuliskan) : ...  
 c. Sangat kurang
18. Bentuk kendala apa saja yang terjadi pada penyediaan jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait  
 b. Kurangnya dukungan dalam penyediaan dana bagi pembangunan infrastruktur  
 c. Kawasan perumahan terlalu jauh dari akses induk utama jaringan PSU  
 d. Semua jawaban benar  
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
19. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi, bentuk ketidak-terpaduan pembangunan sarana dan prasarana seperti apa yang muncul sehingga memberikan dampak negatif?
- a. Akses jalan yang arus kendaraannya mengakibatkan kemacetan dengan lokasi perumahan lain  
 b. Drainase/ saluran pembuangan air rumah tangga dan badan jalan yang mengakibatkan banjir pada lokasi perumahan lain  
 c. Lokasi pembuangan sampah yang mengganggu lokasi perumahan lain  
 d. Semua jawaban benar  
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
20. Solusi apa saja yang telah/saat ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam penyediaan jaringan sarana/prasarana umum pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait agar terjalin hubungan yang harmonis guna memperlancar program penyediaan sarana/ prasarana umum  
 b. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya yang mampu mendukung Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam hal penyediaan dana  
 c. Membuat perencanaan kawasan perumahan dan permukiman yang letaknya tidak jauh dari akses induk prasarana dan sarana umum  
 d. Semua jawaban benar  
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
21. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Provinsi, apakah komposisi jumlahnya sudah sesuai dengan SK Menpera Nomor: 04/KTPS/BK4N/1995 Tgl 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang, yaitu dengan komposisi 1 rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana?
- a. Sudah  c. Tidak tahu  
 b. Belum  d. Lainnya (tuliskan) : ...
22. Jika sudah, apakah ada kendala yang timbul berkaitan dengan pengaturan mengenai komposisi jumlah rumah tersebut?
- a. Ada  c. Tidak tahu  
 b. Tidak ada  d. Lainnya (tuliskan) : ...
23. Jika ada, apa kendala tersebut?
- a. Koordinasi yang kurang harmonis antar lembaga terkait (*stakeholders*)  
 b. Pengembang perumahan kurang berminat untuk membangun rumah sederhana  
 c. Kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan berdasarkan komposisi  
 d. Semua jawaban benar  
 e. Lainnya (tuliskan) : ...